

Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Studi Kasus Penggunaan Medis Operasi Pria dalam Program Keluarga Berencana Pria)

Oleh:

Aryan Prasetyawan, Zainal Hidayat, Nina Widowati
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

ABSTRACT

Research aims to describe implementation family planning man in kelurahan srandol wetan, sub-district banyumanik, city semarang and to know factors can obstruct family planning man in kelurahan srandol wetan. Locus used in this research is in kelurahan srandol wetan, sub-district banyumanik, city semarang. This research using methods research qualitative spatially descriptive. Subject in this research consisting of 3 informer main.

Based on the findings research shows that the family planning program man in kelurahan srandol wetan sub-districts banyumanik can be categorized less successful. The family planning program man can retard diponegoro is: (social, environmental factors religion, culture) factor resources, the communication and the target groups.

Conclusion in this research is the implementation of the family planning program man in kelurahan srandol wetan sub-district banyumanik, less successful especially seen on the participation of the man who continue to decline. Based on the conclusions researchers recommend to the government to be more prioritize famliy planning program for man so that the program could achieve a more satisfactory results.

Keyword : *Implementation Policy, Family Planning Program For Men*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan salah satu permasalahan adalah masih tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009 mencapai 231 juta jiwa, meningkat 1,29% dari sebelumnya pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa. Sedangkan hasil sensus tahun 2010 yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% pertahun. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tidak dapat dipungkiri berbagai masalah ekonomi dan pendidikan akan mengancam penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan mempersulit usaha pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar pula usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah lain yang dapat timbul adalah kerawanan sosial serta pendidikan maupun tingkat kesehatan yang rendah. Sulitnya memenuhi kebutuhan pangan dan papan bagi keluarga dapat memicu terjadinya perbuatan yang melanggar norma dan agama. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya jumlah pengangguran, karena peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh jumlah

lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan dengan program Keluarga Berencana.

Upaya utama dalam mengatasi jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat adalah dengan Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana merupakan program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur usia perkawinan, jarak kehamilan, serta jumlah anak ideal dalam suatu keluarga. Seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam program ini, selain itu untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

Pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Ditetapkannya Undang – Undang ini adalah sebagai landasan untuk pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia.

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional . KB memiliki arti mengatur jumlah anak sesuai kehendak anda, dan menentukan sendiri kapan anda akan hamil, serta bisa menggunakan metode KB yang sesuai dengan keinginan dan kecocokan kondisi tubuh anda .

Sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan

tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan terpadu dalam rangka mencapai keluarga berkualitas, keluarga sejahtera.

Program keluarga berencana (KB) adalah tanggung jawab bersama. KB merupakan program jangka panjang karena dampaknya baru bisa dirasakan di kemudian hari. Kini, program KB di Jawa Tengah menunjukkan hasil cukup baik. Itu bisa dilihat dari peningkatan pemahaman dan penerimaan program KB di masyarakat. Semua itu tak lepas dari dukungan dan komitmen politis yang kuat berbagai lapisan masyarakat dan penerapan sistem manajemen KB secara baik dan konsisten hingga ke lapangan. Namun, ada permasalahan menonjol dalam pelaksanaan program secara nasional, termasuk di provinsi Jawa Tengah, yakni partisipasi pria yang rendah dalam persentase dalam program KB.

Dalam rangka kesetaraan gender, peran serta pria dalam program KB pun mulai digalakkan, tidak hanya wanita / istri saja yang berperanserta aktif dalam program KB namun pria / suami pun dapat ikut turut serta dalam program tersebut. Sejak dahulu wanita selalu dijadikan objek dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi baik berupa pil, suntik maupun Medis Operatif Wanita (MOW). Seiring dengan perkembangan jaman, kini mulai tersedia alat kontrasepsi pria berupa kondom dan vasektomi atau Medis Operatif Pria (MOP). Dalam pelaksanaan program KB-Pria, diharapkan adanya peranserta dari berbagai pihak baik dari wanita / istri maupun pria / suami. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 25 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyebutkan bahwa Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam

melaksanakan keluarga berencana.

Menurut data dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah bulan November tahun 2011, jumlah Pasangan Usia Subur di Jawa Tengah sekitar 6 juta, 77,78% telah menjadi peserta KB aktif, yang meliputi 2,32% peserta KB aktif pria dan 75,46% peserta KB aktif wanita. Sementara itu, di Kota Semarang jumlah hasil pelayanan peserta KB Pria selama empat bulan terakhir dari jumlah 63.618 orang adalah 12,02% orang menggunakan MOP; 87,97% orang menggunakan kondom dan di Kecamatan Banyumanik hanya 8,31% yang menggunakan MOP dan 91,6% yang menggunakan kondom.

Dari data di atas dapat dilihat tingkat partisipasi pria dalam program keluarga berencana masih rendah, hal ini terlihat dari peserta aktif KB Pria yang hanya 2,20% di Jawa Tengah. Di Kota Semarang penggunaan MOP 12,02% dan hanya 87,97% menggunakan kondom. Sementara lebih fokus lagi Kecamatan Banyumanik hanya 8,31% yang menggunakan MOP dan 91,6% yang menggunakan kondom dari capaian program yang telah ditetapkan pemerintah.

Program Keluarga Berencana bukanlah program yang hanya dijalankan oleh pemerintah pusat semata. Di era desentralisasi saat ini, kewenangan pemerintah pusat mengenai program KB harus dapat ter-desentralisasikan dengan baik, seperti yang tertera dalam pasal (23) ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi"

Partisipasi pria yang rendah dalam penggunaan alat kontrasepsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal antara lain berkaitan dengan organ reproduksi dan biologis pria karena pengendalian kemampuan reproduksi pria lebih sulit. Pria selalu dalam keadaan subur dan menghasilkan

banyak sperma. Rendahnya pengetahuan pria akan metode KB yang ada. Mereka tidak mengetahui tujuan, fungsi, efek dari penggunaan metode yang ada. Adapun faktor eksternal adalah keterbatasan alat KB bagi pria. Selain itu ada mitos atau anggapan keliru di masyarakat bahwa vasektomi atau sterilisasi bisa memengaruhi libido pria. Muncul pula kekhawatiran para istri karena beranggapan suami yang vasektomi atau sterilisasi berpeluang lebih besar untuk menyeleweng. Sebagian besar masyarakat pun masih menempatkan perempuan sebagai objek dalam masalah seksual dan reproduksi, karena yang hamil dan melahirkan perempuan, perempuan pulalah yang harus ikut KB agar tidak hamil.

Hakekatnya, program KB tidak lantas begitu saja diserahkan kepada wanita. Peran serta dari pria dapat menjadi faktor utama dari keberhasilan program KB tersebut. Dengan adanya peran serta dari pria dalam program KB, diharapkan tingkat keberhasilan dari program KB dapat terus meningkat.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Srandol Wetan dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Srandol Wetan.

C. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Grindle (dalam Solichin Abdul Wahab, 2004:64) Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur - prosedur rutin lewat saluran - saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Pada dasarnya ada lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2011:650-652) yaitu :

- Ketepatan Kebijakan
- Ketepatan Pelaksana
- Ketepatan Target
- Ketepatan Lingkungan

D. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya (Moleong :2007, 11).

Fokus pada penelitian ini yaitu implementasi program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Peneliti ingin melihat pelaksanaan dari Program Keluarga Berencana Pria, selain itu juga ingin melihat faktor – faktor apa saja yang dapat menghambat dalam program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Srandol Wetan. Lokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh, dan lokasi yang

dijadikan sasaran dalam penelitian adalah Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Pemilihan lokus tersebut didasarkan atas fakta – fakta di lapangan bahwa pelaksanaan Program KB pria di daerah tersebut kurang berhasil, selain itu juga terdapat pertimbangan pribadi dari peneliti. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

Metode teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *non probability sampling*, karena populasi yang diteliti *infinite* (populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui) selain itu juga dilakukan pengambilan sampel secara *Purposive Sampling*.

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program KB Pria

- **Ketepatan Kebijakan**

Program KB pria merupakan kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan. Kecamatan Banyumanik juga telah melakukan upaya yang sesuai dengan isi program maupun undang-undang yang mengaturnya. Menurut kader KB pria sendiri juga mengakui bahwa program ini sangat tepat. Yang menjadi hambatan adalah terkadang terdapat permasalahan yang tidak diduga sebelumnya terjadi dilapangan. Sehingga implementasi dari KB pria sedikit terhambat.

Peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada permasalahan dalam fenomena ketepatan kebijakan. Program telah dijalankan sesuai petunjuk awal yang dibuat. Program ini juga didukung oleh Undang-undang yang mengatur mengenai

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- **Ketepatan Pelaksana**

Aktor implementasi KB pria di Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Spondol Wetan sudah tepat. Program KB pria merupakan program yang bersifat memberdayakan masyarakat, sehingga pelaksanaannya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah dan kelompok masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan tidak terjadi masalah pada fenomena ketepatan pelaksana. Pelaksana program sudah sesuai dengan sifat dari kebijakan KB pria itu sendiri. Program KB pria bersifat memberdayakan masyarakat, sehingga pelaksanaannya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah dan kelompok masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dalam fenomena ini, pelaksana program dalam implementasi KB pria di Kelurahan Spondol Wetan Kecamatan Banyumanik adalah Kecamatan dan paguyuban Priyo Utomo.

- **Ketepatan Target**

Ketepatan target berkenaan dengan, pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau

harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

Dari hasil penelitian mengenai fenomena ketepatan target, peneliti berkesimpulan masih terjadi masalah. Respon masyarakat dalam program KB pria selama ini masih belum memuaskan. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang KB pria. Respon masyarakat yang belum memuaskan dapat menjadi sikap dari target yang diintervensi terhadap suatu kebijakan.

- **Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dapat dilihat dari dua elemen, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan dengan melihat *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian pada fenomena ketepatan lingkungan, peneliti berkesimpulan bahwa masih terjadi permasalahan dalam fenomena ketepatan lingkungan. Masalah yang muncul adalah masih belum adanya peran dari media massa yang benar-benar nyata. Media massa selama ini masih memandang KB wanita sebagai komoditi unggulan untuk dijadikan tajuk utama mereka. Selain itu, tidak adanya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi program KB secara besar – besaran melalui media massa. Jika peran media massa mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, program KB pria diharapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pesan dari KB pria akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui peran media massa.

2. Faktor yang dapat menghambat implementasi program KB Pria

- **Faktor lingkungan**

Faktor lingkungan merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, agama, ekonomi dan politik dan seterusnya. Dalam fenomena faktor lingkungan ini, peneliti mencoba untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa aspek lingkungan. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah sosial, budaya, agama, tingkat pendidikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap aspek-aspek yang ada dalam faktor lingkungan,

peneliti telah mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah harus segera merubah pola pikir yang selama ini berkembang mengenai KB pria. Kedua, pemerintah harus lebih peka untuk menanggapi permasalahan di luar lingkup pemerintahan. Dikarenakan, lingkungan eksternal memungkinkan untuk terjadinya permasalahan baru, yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya.

- **Faktor Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa sumber daya di dalam implementasi program KB pria di Kecamatan Banyumanik masih belum mencukupi. Sumber daya tersebut meliputi, sumber daya manusia maupun keuangan. Tanpa sumber daya yang memadai dengan baik, program KB pria tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas dilapangan yang belum mencukupi. Jumlah petugas belum mampu mencukupi dari kebutuhan tiap kelurahan. Berdasarkan observasi peneliti, jumlah petugas yang ideal adalah dua petugas tiap satu kelurahan. Tiap petugas tersebut diharapkan mampu membentuk paguyuban Priyo Utomo di kelurahannya masing-masing. Dengan keadaan yang ditemukan peneliti melalui hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor penghambat dari implementasi program KB pria di Kecamatan Banyumanik.

- **Faktor Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Kurang berhasilnya program KB pria dapat dikarenakan komunikasi yang berjalan tidak baik antara implementor dengan target group, sehingga target group tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manfaat dari program yang akan dilaksanakan.

Dari hasil penelitian mengenai fenomena komunikasi, peneliti telah mengambil kesimpulan. Peneliti berkesimpulan bahwa, secara teknis informasi telah dilakukan berdasarkan metode yang sesuai, yaitu metode sosialisasi dan KIE. Tetapi terjadi permasalahan di lapangan ketika yang diberikan penyuluhan adalah istri, bukan pria. Hal ini menyebabkan informasi tidak tersampaikan kepada sasaran yang tepat. Dengan demikian, peneliti berkesimpulan fenomena komunikasi dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan dari program KB pria di Kecamatan Banyumanik

- **Aktor Implementasi**

Aktor implementasi dimaknai peneliti sebagai peran dari pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi program KB pria. Kebijakan keluarga berencana adalah kebijakan yang bersifat bottom up atau dari atas ke bawah. Peran pemerintah

dalam implementasinya hanya di tataran rendah. Dalam fenomena aktor implementasi, peneliti menitikberatkan kepada siapa saja pelaksana program dan apa peran dari masing-masing lembaga tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti telah mendapatkan ada tiga organisasi yang berperan dalam implementasi program KB pria di Kecamatan Banyumanik. Organisasi tersebut antara lain adalah Bapermasper dan KB, UPTB Kecamatan Banyumanik dan Paguyuban Priyo Utomo. Kemudian peneliti mencoba untuk menanyakan bagaimanakah peran dari masing-masing organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan tidak ada permasalahan dalam aktor implementasi. Semua aktor implementasi dalam KB pria di Kecamatan Banyumanik menjalankan peran sesuai dengan semestinya. Bapermasper dan KB berperan sebagai perencanaan dan pembuatan program. Kecamatan berperan sebagai pelaksana program di tingkat kecamatan. Priyo Utomo berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mau ber KB di tingkat kelurahan.

- **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran adalah bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Program KB pria bersifat *bottom up* yang artinya membutuhkan partisipasi masyarakat. Kelompok sasaran dari program KB secara keseluruhan adalah PUS (Pasangan Usia Subur). Sedangkan kelompok sasaran dari KB pria itu

sendiri adalah pria yang sudah menikah. Berdasarkan observasi peneliti, tidak ada batasan usia dalam program KB pria, yang menjadi syarat utama adalah selama pria tersebut sudah menikah. Selain itu, pria tersebut juga harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangannya. Karena KB pria merupakan KB untuk selamanya. Banyak pria tidak mengerti manfaat dari KB pria, atau bahkan mereka tidak tahu sama sekali tentang KB pria. Ketidaktahuan tersebut yang menyebabkan sikap mereka terhadap KB pria kurang antusias. Sikap mereka cenderung apatis dan memandang KB sebagai tanggung jawab wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, peneliti berkesimpulan masih adanya masalah dalam kelompok sasaran. Mereka belum mampu menerima pola-pola interaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka cenderung bersikap apatis terhadap KB pria. Hal ini disebabkan pengetahuan mereka yang minim mengenai KB pria. Pengetahuan akan manfaat dan tujuan dari program KB pria. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada pria menjadikan mereka tidak mengetahui manfaat dan tujuan program ini. Oleh karena itu. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kelompok sasaran itu sendiri dapat menghambat dari implementasi program KB pria di Kecamatan Banyumanik.

F. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Implementasi Program Keluarga Berencana Pria

- Respon masyarakat terhadap program KB pria masih belum memuaskan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu KB pria, sehingga muncul pandangan-

pandangan negatif, yang membuat implementasi KB pria menjadi terhambat. Ketidaktahuan masyarakat akan KB pria dapat disebabkan kurangnya sosialisasi, atau sosialisasi yang telah dilakukan kurang mengenai langsung kepada masyarakat.

- Peran media dalam program KB pria masih rendah, media massa selama ini masih memandang KB wanita sebagai komoditi unggulan untuk dijadikan tajuk utama mereka. Selain itu, belum adanya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi program KB pria secara besar – besaran melalui media massa.

2. Faktor yang menghambat Program KB Pria

- Faktor Lingkungan menjadi faktor yang dapat menghambat implementasi program KB pria. Terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi faktor penghambat KB pria, aspek tersebut adalah:
 - a) Aspek agama, belum adanya dukungan dari tokoh agama di dalam program KB Pria. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan KB pria dari sisi agama. Sebagian besar tokoh agama masih menganggap KB pria sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama.
 - b) Aspek sosial, masih banyak anggapan yang bermunculan dari pria bahwa jika ikut MOP akan mengurangi “kejantanan”, selain itu juga masih adanya anggapan bahwa KB itu urusannya perempuan. Dari pihak istri terkadang juga muncul rasa

takut kalau suaminya ikut MOP.

- c) Aspek budaya menjadi hambatan dari pelaksanaan dari program KB pria. Adanya budaya ewuh pekewuh di masyarakat sehingga mereka merasa tabu untuk membicarakan program KB pria, atau adanya anggapan bahwa pria sebagai kepala rumah tangga, sehingga berhak memutuskan masalah KB. Sejatinya, KB harus dirundingkan dalam pemilihan alat kontrasepsi nya, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Untuk urusan KB, wanita juga berhak mengambil sebuah keputusan.
- Sumber daya di dalam implementasi program KB pria di Kecamatan Banyumanik masih belum mencukupi. Sumber daya tersebut meliputi, sumber daya manusia maupun keuangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas dilapangan yang belum mencukupi. Jumlah petugas belum mampu mencukupi dari kebutuhan tiap kelurahan.
 - Metode penyuluhan program KB pria yang dilakukan oleh pemerintah masih tergolong metode konvensional. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi konsistensi masih tergolong rendah. Sosialisasi hanya dilakukan maksimal tiga bulan sekali.
 - Kelompok sasaran belum mampu menerima pola-pola interaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka cenderung bersikap apatis terhadap KB pria.

b) Saran

- Untuk mengatasi respon masyarakat yang masih rendah, pemerintah perlu melakukan sosialisasi program KB pria yang lebih intensif. Sosialisasi harus rutin dilaksanakan kepada masyarakat khususnya para suami, minimal satu bulan sekali. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, diharapkan pesan dari KB pria dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan respon masyarakat.
- Untuk meningkatkan peran media, perlu adanya kerjasama yang nyata antara pemerintah dan media. Kerjasama tersebut dapat berupa inisiatif pemerintah untuk memuat tajuk berita utama mengenai KB pria di surat kabar, pemasangan baliho atau pamflet yang berisi ajakan untuk melakukan KB pria, melakukan ajakan ber KB pria melalui media online.
- Untuk mengatasi hambatan dari faktor lingkungan, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam faktor lingkungan. Aspek agama, perlu adanya kerjasama pemerintah dengan tokoh agama atau departemen agama untuk meyakinkan masyarakat tentang KB pria, para ulama dapat menyelipkan pesan untuk ber KB pria dalam setiap ceramahnya. Aspek sosial, perlu adanya peran pemerintah untuk membuat para pria mengerti bahwa KB tidak hanya urusan wanita saja, dapat berupa edukasi kepada para pria akan pentingnya KB pria. Aspek budaya, perlu adanya upaya pemerintah untuk mampu menyadarkan masyarakat agar mulai meninggalkan mitos-mitos yang dapat menghambat KB pria, dapat dilakukan dengan sosialisasi

melalui acara-acara budaya yang diselenggarakan oleh Kelurahan Srandol Wetan dan Kecamatan Banyumanik

- Untuk mengatasi hambatan di bidang sumber daya, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di dalam organisasi UPTB bidang Keluarga Berencana di Kecamatan Banyumanik. Peningkatan dapat berupa penambahan jumlah PLKB, penambahan alokasi anggaran untuk KB pria. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas para penyuluh KB di lapangan, terutama menyangkut etos kerja.
- Untuk mengatasi hambatan dalam faktor komunikasi, perlu adanya metode penyampaian pesan yang baru dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan secara formal, tapi juga informal. Sosialisasi informal dapat dilakukan melalui pertemuan arisan bapak-bapak di tingkat RT maupun RW atau di tempat-tempat yang biasa untuk dijadikan berkumpul para pria. Selain itu, sosialisasi harus tepat sasaran kepada para pria, bukan kepada para ibu-ibu melalui pertemuan PKK.
- Untuk mengatasi hambatan dalam faktor kelompok sasaran, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan memberikan edukasi mengenai tujuan dan manfaat dari program KB pria. Edukasi mengenai KB pria dapat dilakukan oleh Paguyuban Priyo Utomo dan didampingi oleh seorang motivator KB dari pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih yakin terhadap manfaat dari program KB pria ini.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.rev, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Komputindo

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi KeImplementasi*. Jakarta: Bumi Aksara